

Kepemimpinan Perempuan Dalam Mensejahterakan Masyarakat Kabupaten Bengkalis Perspektif Fiqh Siyasah

Askana Fikriana¹, Akhiri Syakban²

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis,

¹afikriana20@gmail.com

²akhirisyakban22@gmail.com

Abstrak

Kepemimpinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Hal ini disebabkan karena dalam lingkungan hidup suatu masyarakat akan ada seseorang yang memimpin kawasan tersebut, dengan tujuan untuk mengelola kawasan tersebut dalam berbagai aspek. Seorang pemimpin pada umumnya adalah laki-laki, namun pembahasan mengenai kepemimpinan perempuan menjadi sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan, mengingat kemampuan dan peran perempuan yang saat ini diketahui pada dasarnya adalah seorang istri dan ibu rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kepemimpinan perempuan dalam perspektif fiqh siyasah berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan metode studi literatur dalam mengolah data dan informasi yang diperlukan. Berdasarkan tinjauan beberapa sumber dan informasi, terdapat perbedaan pendapat mengenai permasalahan ini, ada pula ulama yang berpendapat bolehnya perempuan menjadi pemimpin, ada juga yang tidak. Melihat potensi yang ada sebaiknya dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya Kabupaten Bengkalis dengan potensi sumber daya alamnya yang melimpah serta potensi perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia ekonomi dan politik, karena tidak ada yang membedakan laki-laki dan perempuan. dalam Islam melainkan ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Sebagai seorang pemimpin hendaknya mengemban amanah yang telah diberikan kepada dirinya, baik di pemerintahan pusat maupun daerah, dengan memberikan pelayanan berupa pelayanan perlindungan, perlindungan masyarakat, dan pelayanan pembangunan agar masyarakat merasa sejahtera di bawah kepemimpinan yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Kata Kunci : Kepemimpinan, Perempuan, Islam, Fiqh Siyasah, Kabupaten Bengkalis.

Pendahuluan

Kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu usaha yang kooperatif mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Seorang pemimpin harus menjalankan tugas-tugas yang sudah dibebankan kepada dirinya, serta mengatur hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin untuk menciptakan keselarasan. Kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan pribadi untuk menstimulus orang untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama (Kartono Kartono, 2010)

Pada umumnya seorang pemimpin adalah laki-laki, namun tidak menutup kemungkinan seorang Perempuan juga menjadi seorang pemimpin, meskipun banyak tantangan yang akan dihadapi. Wacana pemimpin perempuan sudah dimulai sejak tahun 1998, hal ini menimbulkan perdebatan yang cukup kompleks dari berbagai pihak, jika bicara tentang kesempatan maka didalam Islam sendiri kaum laki. -laki maupun kaum perempuan memiliki kesempatan yang sama (Al Afgani & Riandadari, 2018). Pendapat

ini diperkuat dengan penjelasan pada Surah An-Naml didalam Al-Qur'an yang menceritakan pada masa Nabi Sulaiman AS, Kerajaan Saba' (Yaman) pada saat itu dipimpin oleh Ratu Balqis, ini menunjukkan bahwasanya Islam tidak melarang perempuan untuk mengambil peran sebagai seorang pemimpin.

Dalam dunia sosial, kaum perempuan selalu dihadapkan dengan berbagai problematika seperti: perempuan senantiasa menjadi objek kekerasan dan perdagangan terhadap kelebihan dan kelemahan yang dimilikinya, sebelum berhadapan dengan perannya dalam pembangunan nasional dan pemberdayaan Perempuan di Indonesia (Carles, Barquero, & Malonda, 1993) Ketika berbicara persoalan gender, kaum perempuan selalu terjebak dalam stereotip bahwasanya mereka selalu hidup dalam ketergantungan terhadap kaum laki-laki, terlebih lagi setelah menginjak usia remaja mereka menjadi beban dikarenakan pendapatannya lebih rendah dibandingkan kaum laki-laki.

Stereotip tersebut membelenggu pola pikir kaum Perempuan dalam menjalani kehidupannya, yang mengakibatkan mereka tidak percaya diri bahkan kehilangan jati dirinya, dibayang-bayangi oleh ketakutan untuk bereksplorasi dan memunculkan produktivitasnya. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Istri Nursholikah yang berjudul Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat membahas tentang bagaimana sikap Perempuan dalam menjadi seorang pemimpin, namun dalam penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kepemimpinan perempuan dalam mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bengkalis perspektif Fiqh Siyasah. Karena jika mengangkat persoalan kepemimpinan perempuan tidak terlepas dari hukum-hukum dan aturan ajaran Islam, sehingga membutuhkan literasi yang menjelaskan hal tersebut agar menjadi titik terang bagi berbagai pihak agar tidak disalahpahami.

Sehubungan dengan hal diatas, berdasarkan data visualisasi data kependudukan yang diambil oleh Kemendagri 2023 menyatakan bahwa wilayah Kabupaten Bengkalis sendiri membentang seluas 6.973,00 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 651.835 jiwa pada pertengahan tahun 2023. Dengan penghasilan minyak bumi yang melimpah, pendapatan masyarakat setempat juga berkisar pada perkebunan, pertanian, bahkan perikanan karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Bengkalis terdapat beberapa daerah yang berada di pesisir pantai. Hal ini menunjukkan bahwasanya banyak potensi yang dapat dikembangkan baik dari sisi pendapatan daerah maupun pendapatan lokal masyarakat dengan kondisi geografis yang mendukung, sehingga dengan adanya kepemimpinan perempuan di Kabupaten Bengkalis saat ini dapat mensejahterakan masyarakat tanpa menyalahi aturan hukum maupun agama.

Tinjauan Literatur

Mengenai Kepemimpinan

Kata pemimpin dalam Bahasa Arab disebut imamah, yang artinya kepala, penghulu, kepemimpinan secara umum (Al-Marbawi, 2013). Menurut Ibnu Khaldun, kepemimpinan adalah tugas serta tanggung jawab yang harus ditunaikan karena berkaitan dengan kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat, karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan umat sudah semestinya mengacu pada syariat. Dapat disimpulkan bahwasanya kepemimpinan merupakan suatu

hal yang ditugaskan kepada seorang yang disebut pemimpin untuk menjalankan tugasnya dalam mensejahterakan kehidupan umat, yang membutuhkan peran seorang pemimpin dan masyarakat yang dipimpin.

Sedangkan ad-Dahlawy berpendapat bahwa kepemimpinan itu untuk menghidupkan ilmu agama, menegakkan ajaran Islam, menetapkan peradilan hukum-hukum yang berlaku, mencegah kemungkaran dengan perbuatan yang ma'rif, guna menjadi pengganti Rasulullah SAW (Al-Zuhaily, 1984). Didalam buku *The Art of Leadership*, Ordwav Tead mengemukakan pendapatnya bahwasanya kepemimpinan merupakan suatu aktivitas yang melibatkan orang-orang yang mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai rencananya.

Dari berbagai penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan makna dari kepemimpinan adalah seorang pemimpin yang ditugaskan untuk memimpin serta membangun hubungan yang baik bersama yang dipimpinnya untuk mencapai kepentingan bersama. Seorang pemimpin tidak hanya ditugaskan untuk menjalani kehidupan duniawi yang dipimpinnya, melainkan menjadi ladang untuk kemashlahatan umat di akhirat kelak, dengan senantiasa melakukan perbuatan yang baik, dan mencegah perbuatan yang buruk, maka tujuan tersebut akan dapat lebih mudah terlaksana.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian library research, yakni serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data kepustakaan (Kote-Jarai et al., 2011). M. Nazir mengatakan bahwa studi kepustakaan merupakan Teknik pengumpulan data dengan melakukan telaah pada jurnal, buku, catatan maupun laporan yang berhubungan dengan masalah yang ingin diselesaikan (Huang et al., 2003). Adapun tahapan yang dilakukan adalah: mengumpulkan bahan-bahan yang akan diteliti, membaca bahan kepustakaan, membuat catatan, dan mengolah data melalui catatan, sehingga data yang telah didapatkan itu dianalisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang kemudian akan disusun (Iskander, Abo Zed, El Sayed, & Fanos, 2008). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dari buku, jurnal, majalah, serta informasi yang berkaitan dengan penelitian, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mencatat kejadian yang telah berlalu, dokumen ini bisa berbentuk catatan, foto, gambar, maupun film.

Hasil dan Diskusi

Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Kepemimpinan dalam perspektif Islam merupakan sebuah amanah yang harus dijalankan dengan baik, adil, jujur, serta bijaksana, dan diberikan kepada orang yang mampu untuk menjadi seorang pemimpin, karena hal ini menyangkut kemaslahatan umat. Menjadi seorang pemimpin bukan hanya sekedar menjalani aturan-aturan hukum yang berlaku, namun aturan-aturan yang telah diberikan oleh Allah juga harus dilaksanakan dengan baik, dengan mengerjakan perintah yang telah Allah berikan, dan meninggalkan segala larangan-Nya. Dalam hal ini ketakwaan seorang pemimpin dapat terlihat, jika seorang memiliki takwa yang tinggi kepada Allah SWT, maka ketakwaan inilah yang membuatnya bersikap amanah atau tidak.

Dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah 246-250 menceritakan tentang pengangkatan kepemimpinan Thalut pada saat berperang melawan Jalut, sebagian besar masyarakat menolaknya karena Thalut bukan berasal dari orang kaya, namun Allah memberikannya kelebihan pada ilmu pengetahuan dan jasmaninya. Sehingga pada akhirnya Thalut lah yang dipilih menjadi seorang raja, karena Thalut lebih pantas untuk menjadi seorang raja dengan ilmu pengetahuan dan jasmaninya yang baik, hal ini menunjukkan bahwasanya faktor ilmu pengetahuan dan jasmani (Lumbanraja & Lumbantobing, 2022) merupakan hal penting yang perlu diperhatikan untuk memilih seorang pemimpin.

Adapun perbedaan pendapat dari para ulama Sunni dan Syiah, diantaranya adalah:

a. Ulama Sunni

Suatu kepemimpinan dibentuk untuk menjaga agama dan mengelola persoalan pemerintahan di dunia, maka dari itu Al-Mawardi mengatakan wajib fardhu kifayah secara syara' untuk membentuk suatu kepemimpinan yang tidak hanya rasional saja. Adapun tujuh syarat yang harus diperhatikan untuk memilih seorang pemimpin, yaitu:

1. Mampu bersikap adil
2. Memiliki wawasan yang luas, sehingga bisa memmbuat keputusan yang tepat
3. Memiliki tubuh yang sehat secara jasmani
4. Memiliki anggota tubuh yang tidak cacat
5. Memiliki kecerdasan untuk mengatur rakyat dan pemerintahannya
6. Memiliki sikap yang tegas dan berani untuk membela yang lemah dari musuh
7. Berasal dari keturunan suku Quraisy

Ibnu Khaldun juga menguraikan tentang pemimpin dalam kitab muqaddimah-Nya, yaitu: pengetahuan, keadilan, sehat jasmani dan rohani, kesanggupan, dan suku Quraisy. Mengenai kepemimpinan, khalifah Abu Bakar pernah menjadi pemimpin ketika Rasulullah wafat, sehingga ada beberapa poin penting yang dapat menjadi acuan dalam memilih seorang pemimpin, yaitu: sifat rendah hati, sifat terbuka atas kritikan, sifat jujur dan amanah, berlaku adil, komitmen dalam perjuangan, sikap demokratis, dan berbakti kepada Allah (Radi & Budiardjo, 1984) (Bradshaw, 2004).

Ibnu Taimiyah juga berpendapat tentang syarat menajdi seorang pemimpin sebagaimana yang dijelaskan pada Surah Al Qasas ayat 26 yaitu yang memiliki fisik yang kuat dan Amanah, "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

b. Ulama Syiah

Ada beberapa Riwayat yang menyinggung mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan Perempuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah An-Naml ayat 195.

"Dan Tuhan mereka mendengar permo-honan mereka dan ia berkata: Sesungguhnya Aku tidak pernah menya-nyiakan orang yang beriman di antara kamu sekalian, baik laki-laki maupun Perempuan".

Menurut al-Ghazali, mengutip pendapat dari imam Ath-Thabari bahwa yang melatarbelakangi ayat ini adalah ketika Ummu Salamah istri nabi yang mempertanyakan kenapa kaum laki-laki saja yang disebut didalam Al-Qur'an saat hijrah, sedangkan kaum perempuan tidak, karena Ummu Salamah sendiri

sudah pernah melakukan hijrah sebanyak dua kali dalam perjuangan agama Islam (Mernisi dan Hasan, 1996). Atas dasar pertanyaan tersebut, Allah menurunkan firman-nya Surah Al Imran ayat 195 yang menjelaskan bahwasanya Allah tidak pernah menyia-nyiakan siapapun yang beramal sholeh, baik laki-laki maupun perempuan (Naisbitt & Aburdene, 1990).

Jawaban yang didapatkan oleh Ummu Salamah pada saat itu sangat berpengaruh pada kehidupan saat ini, karena menjelaskan tentang kesetaraan gender antara kaum adam dan hawa. Hijrah yang dilakukan merupakan sebuah tindakan yang mengharuskan terlibatnya perempuan dalam hal pemerintahan dan kemasyarakatan, sehingga ini menjadi tanggung jawab perempuan dalam melakukan perbaikan terhadap tatanan hidup masyarakat, yang nantinya mereka akan menerima balasan dari apa yang telah mereka kerjakan (Fiorenza, 1995).

Ketika Ummu Salamah sedang menyisir rambut mendengar Rasulullah sedang khutbah diatas mimbar lantas ia langsung mendengarkannya dari kamar istri Rasul, pada saat itu Rasul membaca Surah Al Ahzab ayat 35 yang menerangkan bahwassanya kedudukan antara kaum laki-laki dan perempuan itu sama. Bahkan dalam Surah An-Nahl ayat 97 Allah juga menyerukan kepada laki-laki dan perempuan untuk berbuat amar ma'ruf dan nahyi mungkar dalam beribadah kepada-Nya, demikian juga mengenai pahala dan siksa antara laki-laki dan perempuan sama saja, melainkan ketakwaanlah yang akan membedakan mereka (Budiardjo, 2003).

Dari berbagai pendapat ulama diatas dapat disimpulkan bahwasanya ada sebagian yang mengharuskan laki-laki untuk menjadi seorang pemimpin, dan ada yang tidak mengharuskan laki-laki menjadi seorang pemimpin dalam artian perempuan juga boleh menjadi seorang pemimpin. Dalam perspektif fiqih siyasah ada yang tetap tidak membolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin dengan alasan secara fisik perempuan akan dihadapi berbagai persoalan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sedangkan ada yang membolehkan dengan alasan kesetaraan gende diantara laki-laki dan perempuan. Namun, pada saat ini banyak aktivis-aktivis yang sedang memperjuangkan hak suara perempuan diranah pemerintahan baik dari negara-negara Islam, maupun negara-negara barat (Nazir, 2003).

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kab Bengkalis Menurut Registrasi Disdukcapil (Jiwa), 2019.

| Kecamatan | Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkalis | |
|------------------|-------------------------------------|-----------|
| | Laki-Laki | Perempuan |
| Bandar Laksamana | 12 358 | 11 761 |
| Bantan | 21 331 | 20 141 |
| Bathin Solapan | 31 443 | 29 493 |
| Bengkalis | 41 694 | 40 417 |
| Bukit Batu | 10 666 | 10 279 |
| Mandau | 77 297 | 73 509 |
| Pinggir | 45 776 | 43 177 |
| Rupat | 17 005 | 16 111 |

| | | |
|----------------|--------|--------|
| Rupat Utara | 7 070 | 6 713 |
| Siak Kecil | 7 738 | 7 219 |
| Talang Muandau | 11 884 | 10 856 |

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2019 diatas menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan gender, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada setiap kecamatan tidak berbeda jauh, sehingga dapat disimpulkan jumlah kaum perempuan dapat terbilang cukup banyak dan hampir setara dengan laki-laki. Dengan melihat data tersebut, maka sebenarnya kaum Perempuan mempunyai kesempatan untuk mengambil langkah menjadi seorang pemimpin, maupun jabatan lainnya dalam dunia pemerintahan (Said, Alam, Ramli, & Rafidi, 2017).

Fungsi dari pemerintahan sendiri adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik itu pemerintahan pusat maupun daerah (Tawale, Budi, & Nurcholis, 2011). Adapun layanan yang diberikan kepada masyarakat guna untuk meningkatkan kesejahteraan pada lingkungan masyarakat itu sendiri, karena hal ini berkaitan dengan sebagai bentuk amanah dalam menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin terhadap yang dipimpin, dengan memberikan beberapa pelayanan seperti:

- a. Pelayanan perlindungan. Pelayanan ini dilakukan untuk memberikan rasa kenyamanan terhadap lingkungan tempat tinggal pada masyarakat, dari berbagai gangguan yang mengganggu kehidupan masyarakat, baik itu tindak kejahatan maupun bencana alam sehingga masyarakat akan merasa terlindungi dan dilindungi oleh pemerintahnya.
- b. Pelayanan publik. Pelayanan ini merupakan pelayanan yang dapat diterima oleh semua kalangan, tanpa melihat jabatan seseorang baik itu pejabat maupun masyarakat awam, karena keperluan administrasi merupakan hal yang banyak ditemukan dalam mengurus suatu kepentingan yang membutuhkan surat-menyurat, dengan adanya fasilitasi yang baik dari pemerintahan setempat dapat membuat masyarakat merasakan respon yang positif dari pemerintah.
- c. Pelayanan pembangunan. Pelayanan ini dilakukan dalam bentuk pembangunan yang bersifat merenovasi maupun membangun fasilitas yang akan menunjang perekonomian masyarakat maupun memudahkan akses masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dengan adanya pembangunan infrastruktur yang bertahap baik dari segi jalan, pembangunan gedung kantor tertentu, atau bahkan perbaikan bangunan sekolah, hal itu sangat membantu masyarakat dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah.

Melihat dengan pelayanan yang diberikan pemerintah setempat, terutama kepemimpinan tersebut dipimpin oleh seorang perempuan sebagai contohnya Kabupaten Bengkalis, dengan kondisi geografis dan sumber daya alam yang mendukung, serta jumlah kaum perempuan yang hampir sebanding dengan kaum laki-laki, sudah seharusnya sebagai seorang pemimpin yang berasal dari kaum perempuan juga meningkatkan potensi perempuan yang ada di Kabupaten Bengkalis (Al-Zuhaily, 1984). Sejalan dengan hal demikian, perempuan sendiri memiliki peranan yang sangat penting dari berbagai aspek, seperti:

Pertama, aspek ekonomi. Keterkaitan Perempuan terhadap perekonomian sangatlah kuat, hal ini dikarenakan mereka sudah terbiasa mengelola perekonomian rumah tangga mereka masing-masing, sehingga memiliki kesempatan untuk mengambil perannya untuk mengatur kehidupan disekitarnya untuk mengendalikan kebutuhan konsumtif agar tidak berlebihan (Naisbitt & Aburdene, 1990). Perempuan dapat menunjukkan peran gandanya sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai tenaga pendidik, pedagang, maupun pejabat Aparatur Sipil Negara yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu (Pudjiwati, 1985).

Kedua, aspek politik. Sejauh ini perempuan sangat dibatasi dengan keadaan yang membuat mereka tidak dapat berpendapat bahkan memberikan gagasan maupun pemikirannya dalam program pembangunan daerah secara formal, dengan kesempatan yang ada menjadi titik terang bagi kaum perempuan untuk masuk kedalam dunia politik pemerintahan dan turut serta dalam pembangunan nasional, peranan perempuan akan menentukan kehidupan manusia dan lingkungan disekitarnya yang sangat diinginkan oleh banyak orang (Fiorenza, 1995). Pembangunan sendiri masih berbicara mengenai pertumbuhan perekonomian yang mengalami dinamikanya, sehingga membutuhkan peran perempuan untuk mengendalikannya agar menjadi pembangunan yang berorientasi pada masyarakat dan lingkungan hidup, untuk menjaga tatanan kehidupan sosial (Kartini Kartono, 2010).

Untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bengkalis, dengan melihat potensi sumber daya alam yang berlimpah, harusnya didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola hal tersebut, dengan memanfaatkan sektor perkebunan, perikanan, bahkan perindustrian dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal maupun daerah. Dengan melihat potensi kaum perempuan di wilayah Kabupaten Bengkalis ini, sebagai seorang pemimpin perempuan dapat memanfaatkan hal tersebut untuk memperjuangkan hak perempuan tampil diranah publik dalam berbagai profesi, seperti dengan mengembangkan produksi UMKM yang saat ini sedang menjadi tren masyarakat tempatan dari yang terkecil hingga dalam jumlah besar, serta melakukan pemberdayaan kaum perempuan melalui organisasi PKK setempat untuk meningkatkan pendapatan dengan berbagai peluang usaha yang dapat dilakukan serta memberikan bantuan permodalan untuk mendapatkan penghasilan tambahan (Malonda, 1993).

Kesimpulan

Kepemimpinan adalah seorang pemimpin yang memiliki amanah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam membangun pemerintahan beserta masyarakat yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan bersama, serta membawa arah kehidupan untuk menjadi lebih baik atau buruk ditentukan oleh pemimpinnya. Dalam perspektif fiqih siyasah juga terdapat berbagai pendapat ulama yang tidak membolehkan perempuan untuk menjadi seorang pemimpin dengan alasan kondisi fisik perempuan, serta ada yang membolehkan dengan alasan kesetaraan gender antara kaum laki-laki dan perempuan. Hingga saat ini banyak para aktivis yang memperjuangkan hak dan suara untuk kaum perempuan untuk mendapatkan tempat dan kedudukan yang sama dengan

laki-laki dalam berbagai hal, namun didalam Islam tidak ada yang membedakan laki-laki maupun Perempuan kecuali tingkat ketakwaannya kepada Allah SWT.

Kabupaten Bengkalis dengan kondisi geografisnya yang mendukung, serta dengan jumlah penduduk perempuan yang hampir sama dengan laki-laki menjadi ruang untuk mengembangkan potensi perempuan setempat untuk turut serta dalam pemerintahan, yang pada kenyataannya saat ini Kabupaten Bengkalis dipimpin oleh pemimpin perempuan. Dengan melihat tugas yang terdapat dalam pemerintahan, seorang pemimpin sudah seharusnya mengayomi masyarakat yang dipimpinnya dengan memberikan pelayanan dalam bentuk pelayanan perlindungan, pelayanan publik, serta pelayanan pembangunan. Potensi daerah yang sangat mendukung dari berbagai sektor membuat peluang besar yang harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai untuk mensejahterakan masyarakat dalam segi peningkatan dibidang perekonomian yang merata.

Daftar Pustaka

- Al Afgani, M. I., & Riandadari, D. (2018). Rancang Bangun Trainer Trafo Step Up dan Step Down Dalam Satu Sistem. *Surabaya: Univertas Negeri Surabaya*.
- Al-Marbawi, M. I. (2013). *Kamus Marbawi*. Pustaka Nasional Pte Ltd.
- Al-Zuhaily, W. (1984). *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Bairut: D r Al-Fikr.
- Bradshaw, D. (2004). *Aristotle East and West: Metaphysics and the division of Christendom*. Cambridge University Press.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Carles, A. G., Barquero, L. R., & Malonda, A. G. (1993). Simultaneous standardization of 90Sr 90Y and 89Sr mixtures. *Applied radiation and isotopes*, 44(7), 1003–1010. Elsevier.
- Fiorenza, E. S. (1995). *Untuk mengenang perempuan itu: rekonstruksi teologis feminis tentang asal-usul Kekristenan*. PT BPK Gunung Mulia.
- Huang, T. T.-K., Harris, K. J., Lee, R. E., Nazir, N., Born, W., & Kaur, H. (2003). Assessing overweight, obesity, diet, and physical activity in college students. *Journal of American college health*, 52(2), 83–86. Taylor & Francis.
- Iskander, M. M., Abo Zed, A. I., El Sayed, W. R., & Fanos, A. M. (2008). Existing marina coastal problems, western Mediterranean coast, Egypt. *Emirates J Eng Res*, 13(3), 27–35.
- Kartono, Kartini. (2010). Pemimpin dan kepemimpinan: apakah kepemimpinan Abnormal itu? *Rajawali Pers*.
- Kartono, Kartono. (2010). Hands on activity pada pembelajaran geometri sekolah sebagai asesmen kinerja siswa. *Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif*, 1(1).

- Kote-Jarai, Z., Leongamornlert, D., Saunders, E., Tymrakiewicz, M., Castro, E., Mahmud, N., Guy, M., et al. (2011). BRCA2 is a moderate penetrance gene contributing to young-onset prostate cancer: implications for genetic testing in prostate cancer patients. *British journal of cancer*, 105(8), 1230–1234. Nature Publishing Group.
- Lumbanraja, R., & Lumbantobing, A. (2022). Harmoni Pembangunan: Peran Perempuan Mensejahterakan Masyarakat Desa. *Jurnal Stindo Profesional*.
- Malonda, B. F. (1993). Tinjauan Tentang Peranan Perempuan dalam Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Pulau Jawa. Artikel disampaikan pada seminar sehari GMT (tidak dipublikasikan).
- Naisbitt, J., & Aburdene, P. (1990). *Megatrends 2000: ten new directions for the 1990's*. New York: William Morrow and Company. Inc., 1990. 384 p.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia Jakarta. *Bahasa Indonesia*.
- Pudjiwati, S. (1985). *Sosiologi Pembangunan*. Fakultas Pascasarjana IKIP Jakarta Bekerjasama dengan BKKBN. Jakarta.
- Radi, U., & Budiardjo, M. (1984). Strategi PPP, 1973-1982: suatu studi tentang kekuatan politik Islam tingkat nasional. (*No Title*).
- Said, J., Alam, M., Ramli, M., & Rafidi, M. (2017). Integrating ethical values into fraud triangle theory in assessing employee fraud: Evidence from the Malaysian banking industry. *Journal of International Studies*, 10(2). Centre of Sociological Research/Tsentr Sotsiolohichnykh Doslidzhen.
- Tawale, E. N., Budi, W., & Nurcholis, G. (2011). Hubungan antara motivasi kerja perawat dengan kecenderungan mengalami burnout pada perawat di RSUD Serui Papua. *Jurnal Insan*, 13(2), 74–84.